

ABSTRAK

Peran Polri di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diharapkan oleh masyarakat, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah kabupaten / kota bersama dengan Kejaksaan, sehingga dituntut optimal dalam penanganannya, akan tetapi dalam penyidikan tindak pidana korupsi Polri dihadapkan dengan aturan administrasi pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi berlakunya Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan terhadap optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Unit Tipikor Satreskrim Polres Rembang.

Tipe penelitian ini adalah deskreptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Penelitian menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas menggambarkan satu atau lebih mengenai implikasi berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan terhadap optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Unit Tipikor Satreskrim Polres Rembang tanpa perlu mengaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal.

Hasil penelitian ini adalah bahwa 1) Polri berperan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sesui dengan kebijaksanaan pimpinan Polri pada Era Reformasi untuk profesional dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dengan melakukan perubahan mendasar menyangkut tiga aspek, yaitu aspek struktural, aspek instrumental dana spekkultural, Jabaran dari kebijakan Kapolri tersebut dalam mewujudkan kualitas penyidik Polri yang diharapkan diperlukan upaya peningkatan dengan komitmen yang kuat dari unsure pimpinan kesatuan Polri dari tingkat pusat hingga kewilayahan yang secara bertahap konsisten memprogramkan upaya pembinaan kemampuan, pembinaan karier, pembinaan sikap mental penyidik Polri dan harmonisasi koordinasi serta memberdayakan lembaga gelar perkara untuk dapat mewujudkan dalam optimalisasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi 2) Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi selain Kejaksaan dan KPK, menemui hambatan dan kendala dalam penanganan tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dalam hal penyalahgunaan kewenangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dibuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Implikasi

ABSTRACT

The role of the Police in the eradication of criminal acts of corruption was very expected by the community, for spearheading the national police in law enforcement criminal acts of corruption in the area of kabupaten/kota along with Kejaksaaan, so that the optimal handling is required, however in the investigation of criminal acts of corruption Police faced with administrative rules after the enactment of Act No. 30 2014 about government administration

This research aims to know the implications of the enactment of Act No. 30 of 2014 on Administrative Governance towards optimization of the eradication of criminal acts of corruption in the Unit Satreskrim Tipikor Polres Rembang

This research type is deskreptif in accordance with the purpose and problems in research. The study describes a number of variables that deal with issues that are examined. In other words, this research is limited to describe one or more about the implications of the enactment of Act No. 30 of 2014 on Administrative Governance towards optimization of the eradication of criminal acts of corruption in the Polres Satreskrim Tipikor Rembang Units without the need to associate these symptoms in a causal explanation.

The results of this research are that 1) national police play a role in law enforcement corruption criminal act sesui with the wisdom of the leadership of the national police in the reform Era for professional in the execution of the duties of law enforcement by making fundamental changes concerns the three aspects, namely, structural aspects, aspects of instrumental and cultural aspects, the policy of Listing the Kapolri in realizing the quality of Police investigators expected the increased effort is required with a strong commitment from the leadership of the Union of Police from central level to the cantonal Parliament which gradually consistent program an effort of coaching ability, career coaching, coaching the mental attitude of the investigating Police and harmonization coordination as well as empowering the institutions title lawsuit to be manifest in the optimization of the inquiry and the investigation of criminal acts of corruption 2) national police as a law enforcement officer authorized as a criminal act corruption investigators in addition to Prosecutors and the KPK, has encountered obstacles and constraints in the handling of corruption criminal act after Act No. validity of 30 2014 about government administration because in the event of abuse of authority against the perpetrator of the criminal offence of corruption must be proven in the courts of The State.

Keywords: Implications